

DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN : STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Heni Wijayanti¹; Lisa Kartikasari²

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang^{1,2}

Email : heniwijayanti2599@gmail.com¹; lisakartika@unissula.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya studi ini adalah menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya belanja modal, ukuran pemerintah, kemandirian daerah, status administratif, pengalaman kepala daerah, serta tingkat kapabilitas APIP terhadap kualitas laporan keuangan pada lingkup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Opini hasil pemeriksaan audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digunakan sebagai indikator dalam menilai kualitas laporan keuangan. Model analisis data yang digunakan yaitu regresi logistik biner dengan sistem data panel. Teknik sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 pemerintah kota dan 29 pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 s.d. 2023, dengan total 308 observasi. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada belanja modal dan kapabilitas APIP terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, status administratif, dan pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal, kelembagaan pengawasan internal, serta skala pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memperluas kajian literatur akuntansi sektor publik, serta implikasi praktis yang dapat mendukung upaya penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Belanja Modal; Kapabilitas APIP; Kualitas Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Regresi Logistik Biner; Opini Audit

ABSTRACT

The purpose of this study is examining the factors that influence the quality of financial reporting, such as capital expenditure, local government size, fiscal independence, administrative status, mayor experience, and the level of internal audit capability (APIP) within local governments in Central Java Province. The audit opinion issued by the Audit Board (BPK) is used as an indicator to assess the quality of financial reporting. The analytical model employed in this study is binary logistic regression using a panel data system. A saturated sampling technique was applied, consisting of 6 city governments and 29 regency governments in Central Java Province over the period 2015 to 2023, with a total of 308 observations. The results show that capital expenditure and APIP capability have a positive and significant effect on the quality of financial reporting. Meanwhile, local government size, fiscal independence, administrative status, and mayor experience do not have a significant effect. These findings emphasize the importance of strengthening fiscal capacity, internal supervisory institutions, and the scale of government in enhancing the accountability of financial reporting in local governments. The theoretical implications of this analysis are expected to contribute to the expansion of public sector accounting literature, while the

practical implications may support efforts to strengthen local government financial governance.

Keywords : Capital Expenditure; Internal Audit Capability; Financial Reporting Quality; Local Government; Binary Logistic Regression; Audit Opinion

PENDAHULUAN

Pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diwujudkan melalui pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip akuntabel, transparan, dan berintegritas (Kurniati et al., 2024). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas. Indikator dalam menilai kualitas laporan keuangan mengacu pada prinsip relevansi, keandalan, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan sebagaimana tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010 dan pengelolaannya sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator penilaian kualitas laporan keuangan di Indonesia umumnya diproksikan menggunakan opini audit yang diterbitkan oleh BPK. Opini audit tidak hanya mencerminkan kewajaran informasi yang disajikan, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap SAP, efektivitas pengendalian intern, serta ketepatan pengungkapan informasi keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004). Persentase perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Jawa Tengah meningkat dari 88,57% pada 2017 menjadi 94,29% (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Namun demikian, meningkatnya tren WTP belum tentu mencerminkan pemerataan kualitas pelaporan keuangan di seluruh daerah, mengingat variasi karakteristik keuangan dan kelembagaan antar wilayah.

Berbagai faktor telah diidentifikasi dalam penelitian terdahulu sebagai determinan kualitas laporan keuangan, antara lain belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut belum menunjukkan konsistensi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah, Yuniar, et al. (2022) menunjukkan bahwa belanja daerah serta ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, Aurelia et al. (2024), justru memperoleh hasil

bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah menunjukkan kualitas laporan keuangan yang lebih rendah.

Selanjutnya, peran APIP dalam mendorong kualitas pelaporan keuangan mulai mendapatkan perhatian lebih, mengingat APIP memiliki fungsi utama sebagai unit pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016, kapabilitas APIP mencerminkan tingkat kematangan institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, semakin besar kemampuannya dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan serta meningkatkan kualitas informasi keuangan (Purnamawati & Hatane, 2020). Namun demikian, beberapa penelitian seperti Fajri & Ritonga (2019) menunjukkan bahwa kapabilitas APIP tidak selalu signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan mengindikasikan perlunya kajian yang lebih kontekstual.

Melalui penelitian ini dilakukan pengkajian pengaruh keenam faktor tersebut terhadap tingkat kualitas informasi keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah dalam periode 2015–2023. Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki keberagaman dalam karakteristik fiskal, administratif, dan tingkat kapabilitas APIP antar pemerintah daerah. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, sehingga diharapkan dapat menangkap kompleksitas kondisi keuangan daerah dalam situasi krisis serta dapat dijadikan dasar untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk situasi darurat seperti pandemi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemimpin dalam suatu organisasi, termasuk di sektor publik, dipandang sebagai pihak yang secara bertanggung jawab mengelola sumber daya dalam rangka kepentingan organisasi atau masyarakat luas. Pemimpin tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan termotivasi secara intrinsik untuk mencapai tujuan bersama, seperti menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks pemerintah daerah, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kepala daerah menjalankan perannya dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dengan memperhatikan indikator kualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh pengguna

laporan. Selain itu, laporan tersebut harus berpedoman pada SAP dan mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, serta mendukung evaluasi atas kinerja fiskal daerah (PP Nomor 71 Tahun 2010). Melalui pandangan *stewardship*, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan keberhasilan kepala daerah sebagai pengelola publik dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap jangka panjang guna mendukung pelayanan publik. Dalam perspektif *stewardship*, alokasi belanja modal mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara akuntabel. Peningkatan belanja modal tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Fadilah & Andriani (2025) menemukan bahwa nilai belanja modal berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah, diperkuat oleh pernyataan Digdowiseiso et al. (2022) bahwa intensitas modal berkontribusi terhadap penyajian laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar penyusunannya. Dengan demikian, belanja modal yang dikelola secara tepat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas.

H₁: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah mencerminkan kapasitas institusional dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan sumber daya publik yang dikuasai. Wilayah dengan skala yang lebih besar pada umumnya memiliki kelebihan dalam ketersediaan sumber daya manusia, sistem informasi yang memadai, serta manajemen administrasi yang lebih tertata, sehingga cenderung lebih mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban data keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam kerangka *stewardship theory*, aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki keselarasan kepentingan dengan publik serta motivasi intrinsik untuk menunjukkan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang berkualitas. Ukuran pemerintah yang lebih besar dinilai memiliki dorongan lebih kuat untuk

mempertahankan kepercayaan publik melalui kinerja pelaporan yang baik. Penelitian oleh Firmansyah, Arfiansyah, et al. (2022) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif serta signifikan antara ukuran pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan, termasuk peningkatan kemungkinan untuk memperoleh opini WTP. Temuan sejenis juga dinyatakan oleh Digdowiseiso et al. (2022), yang menunjukkan ukuran entitas, baik di sektor publik maupun swasta, berkaitan erat dengan kualitas pelaporan karena besarnya tanggung jawab, akses terhadap sumber daya, dan tekanan tata kelola yang dihadapi oleh entitas berskala besar.

H₂: Ukuran pemerintah daerah berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kemandirian fiskal menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi pengeluarannya melalui sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa terlalu tergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam kerangka teori *stewardship*, daerah yang memiliki kemandirian fiskal tinggi seharusnya menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, karena terdapat tekanan langsung dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang bersumber dari wilayahnya sendiri. Dengan demikian, semakin mandiri suatu daerah, diharapkan kualitas pelaporan keuangannya juga semakin baik. Pernyataan ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Taek (2019) yang mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, beberapa penelitian lain seperti Aurelia et al. (2024) dan Firmansyah, Yuniar, et al. (2022) mengungkapkan bahwa kemandirian fiskal tidak selalu menghasilkan pelaporan yang berkualitas. Dalam beberapa kasus, tingginya PAD justru memberikan ruang fleksibilitas yang besar dalam belanja daerah, sehingga mengurangi kedisiplinan anggaran dan membuka peluang terjadinya kelemahan dalam tata kelola. Kondisi ini dapat diperburuk oleh lemahnya pengawasan eksternal dan terbatasnya kapasitas kelembagaan, yang menyebabkan potensi penyimpangan dan manipulasi laporan keuangan.

H₃: Terdapat pengaruh antara kemandirian daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Status administratif pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, mencerminkan perbedaan dalam aspek urbanisasi, kapasitas birokrasi, serta ekspektasi

publik terhadap tata kelola keuangan yang transparan. Pemerintah kota, yang umumnya terletak di wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, cenderung memiliki keunggulan dalam hal kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan tekanan sosial-politik yang lebih besar untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Aurelia et al. (2024) menyatakan bahwa pemerintah kota menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dibandingkan kabupaten, karena dukungan infrastruktur keuangan dan tuntutan transparansi yang lebih kuat. Temuan ini diperkuat oleh Hafsari (2020), yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia—yang cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan—berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan.

H4: Status pemerintah kota memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap kualitas pelaporan keuangan dibandingkan kabupaten.

Pengalaman kepala daerah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemimpin yang telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan umumnya lebih memahami regulasi yang berlaku, proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap sistem akuntansi keuangan. Berdasarkan teori *stewardship*, kepala daerah yang berpengalaman akan menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional yang lebih tinggi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Rakhman & Wijayana (2019) menemukan bahwa kepala daerah dengan pengalaman yang lebih lama cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Fenomena ini diperkuat oleh Aurelia et al. (2024) yang mengidentifikasi adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman kepala daerah dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Pengalaman pemimpin berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas fungsi pengawasan internal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dalam kerangka teori *stewardship*, keberadaan APIP yang kompeten memperkuat sistem akuntabilitas publik dengan memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara andal, patuh terhadap regulasi, dan sesuai dengan pedoman standar akuntansi yang berlaku. APIP yang kapabel tidak hanya mampu mendeteksi kesalahan dalam proses pelaporan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan serta mendorong perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

Purnamawati & Hatane (2020) menunjukkan bahwa kapabilitas auditor internal, termasuk APIP, memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Karaeng & Oktaviani (2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah.

H₆: Kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengadopsi pendekatan kausal asosiatif menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah yang mencakup 29 kabupaten dan 6 pemerintah kota yang berada di wilayah Jawa Tengah dan telah menyusun laporan keuangan serta diaudit oleh BPK selama periode 2015–2023. Teknik sampling jenuh pada data sekunder yang diakses dari *website* resmi pemerintah, yaitu DJPK Kementerian Keuangan, LKPD audited dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, serta Laporan Kinerja BPKP digunakan dalam penelitian ini. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan disusun dalam format data panel untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi logistik biner yang dirumuskan dengan persamaan pada Gambar 2.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil pengujian statistik deskriptif sebagaimana terdapat dalam tabel 3 menunjukkan bahwa (SIZE) ukuran pemerintah daerah berada pada nilai rata-rata 29,01 dengan penyebaran yang relatif rendah (SD = 0,54), mengindikasikan keseragaman kapasitas fiskal antar daerah. Kemandirian fiskal (FINDEP) memiliki rata-rata 18,34 persen dengan standar deviasi 6,84, mencerminkan variasi kemampuan PAD antar pemerintah daerah. Belanja modal (CAPEX) tercatat rata-rata 15,89 persen dengan rentang nilai (4,29%–44,04%), menunjukkan perbedaan prioritas belanja pembangunan. Sementara itu, pengalaman kepala daerah (EXPN) rata-rata adalah 4,30 tahun dengan

deviasi standar 2,66, mengindikasikan keragaman latar belakang kepemimpinan di wilayah sampel.

Pengujian pada multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 10% dan VIF dibawah 10, masing-masing berkisar antara 0,859–0,968 dan 1,033–1,164. Merujuk pada Ghazali (2018), hal ini menyatakan tidak adanya multikolinearitas dalam model yang digunakan. Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow yang ditunjukkan pada tabel 5, dengan nilai Chi-square sebesar 2,918 dan derajat kebebasan (df) 8 serta nilai signifikansi 0,939. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai prediksi model tidak berbeda secara signifikan dari nilai aktual. Dengan demikian, model regresi logistik yang diterapkan dalam kajian ini dinilai sesuai dan memadai untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

Merujuk pada hasil *Model Summary*, nilai -2 Log Likelihood sebesar 79,352 menunjukkan bahwa model regresi logistik cukup sesuai dengan data yang digunakan. Sementara itu, nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,186 dan Nagelkerke R² 0,501 mencerminkan model mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen antara 18,6% hingga 50,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar setengah dari variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model.

Belanja Modal dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian terhadap belanja modal (CAPEX) secara signifikan dan positif memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah, maka semakin tinggi peluang untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Temuan ini mendukung teori stewardship, yang menjelaskan bahwa pengelola sumber daya publik cenderung bertindak akuntabel demi kepentingan masyarakat luas (Donaldson & Davis, 1991).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) serta (Digdowiseiso et al., 2022), mengungkapkan bahwa belanja modal mencerminkan pengelolaan aset dan pencatatan yang sesuai dengan SAP, sehingga berkontribusi pada opini audit yang lebih baik. Namun, temuan ini berbeda dengan Rakhman & Wijayana (2019) serta Aurelia et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh variasi efektivitas pengelolaan aset antar daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian terhadap variabel ukuran pemerintah daerah (SIZE) mengindikasikan adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya sebesar 0,058. Walaupun hipotesis tidak didukung secara statistik, arah koefisien positif menunjukkan bahwa daerah yang lebih besar secara fiskal memiliki potensi untuk menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan Firmansyah, Arfiansyah, et al. (2022) , yang mengemukakan bahwa kapasitas fiskal dan administratif yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah mengelola laporan keuangan dengan lebih efektif. Hasil ini bertentangan dengan Aurelia et al. (2024), yang menyatakan hubungan negatif antara ukuran dan kualitas laporan, diduga karena kompleksitas birokrasi di daerah besar justru dapat menimbulkan inefisiensi. Dalam konteks Jawa Tengah, perbedaan ini menunjukkan bahwa ukuran tidak menjadi faktor penentu tunggal tanpa dukungan kelembagaan yang memadai.

Kemandirian Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kemandirian daerah (FINDEP) tidak memberikan dampak secara signifikan (Sig. 0,663) dan berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PAD belum tentu mencerminkan tata kelola keuangan yang baik. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Aurelia et al. (2024) serta Purnamawati & Hatane (2020) menyatakan bahwa meskipun suatu daerah memiliki PAD tinggi, hal tersebut tidak menjamin adanya sistem pelaporan yang transparan apabila tidak didukung oleh SDM dan sistem akuntansi yang andal. Di Jawa Tengah, sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer, sehingga otonomi fiskal belum mampu menjadi faktor yang mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan.

Status Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Status administratif kota maupun kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan signifikansi 0,523). Meskipun koefisien menunjukkan arah positif, perbedaan tersebut tidak cukup kuat

untuk menjadi bukti statistik. Hasil ini tidak mendukung temuan Aurelia et al. (2024) dan Rakhman & Wijayana (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah kota cenderung memiliki sistem birokrasi dan SDM yang lebih baik. Dalam konteks Jawa Tengah, keseragaman aturan pelaporan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 dapat menjadi alasan mengapa perbedaan status administratif tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Pengalaman Kepala Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis terhadap variabel pengalaman kepala daerah (EXPN) tidak memberikan bukti adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, lamanya masa jabatan tidak menjamin peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini bertentangan dengan Aurelia et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepala daerah yang lebih berpengalaman cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini, peran kepala daerah kemungkinan tidak terlalu dominan dalam penyusunan laporan keuangan, yang lebih banyak dilaksanakan oleh perangkat birokrasi teknis seperti BPKAD.

Kapabilitas APIP dan Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kapabilitas APIP terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai odds ratio hampir mencapai 20 menegaskan bahwa pemerintah daerah dengan APIP yang lebih kapabel memiliki peluang lebih besar untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntabilitas. Hasil ini mendukung penelitian Anto & Yusran (2023) , serta Purnamawati & Hatane (2020) , yang mengarah pada pentingnya fungsi pengawasan internal dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP dapat menjadi salah satu strategi utama dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada 35 pemerintah daerah wilayah Jawa Tengah selama tahun 2015 s.d. 2023, dapat ditarik simpulan bahwa belanja modal dan kapabilitas APIP memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan belanja modal yang akuntabel dan diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan internal dapat meningkatkan peluang bagi pemerintah daerah untuk

memperoleh opini WTP. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, dan pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh secara signifikan. Secara teoritis, temuan ini mendukung pendekatan teori *stewardship* dengan menyoroti pentingnya kombinasi faktor struktural dan individu dalam mendorong akuntabilitas publik. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi perlunya penguatan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, optimalisasi PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pengembangan kapabilitas APIP, serta memperhatikan pengalaman kepala daerah dalam perumusan kebijakan tata kelola keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada dominasi opini WTP dalam data, yang menyebabkan sebaran variabel dependen menjadi tidak merata dan mengurangi kemampuan model regresi dalam membedakan secara efektif kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, agenda penelitian mendatang disarankan untuk memperluas wilayah studi ke daerah dengan distribusi opini audit yang lebih beragam serta mempertimbangkan pendekatan analisis yang lebih kompleks, seperti regresi logistik multinomial. Selain itu, integrasi variabel kelembagaan seperti sistem informasi akuntansi, kompetensi SDM keuangan, dan pengawasan legislatif dapat memperkaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan. Pendekatan campuran (*mixed methods*) juga direkomendasikan untuk menggali secara lebih mendalam dinamika pelaporan keuangan di pemerintah daerah, sehingga kajian ke depan dapat memberikan implikasi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif bagi penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

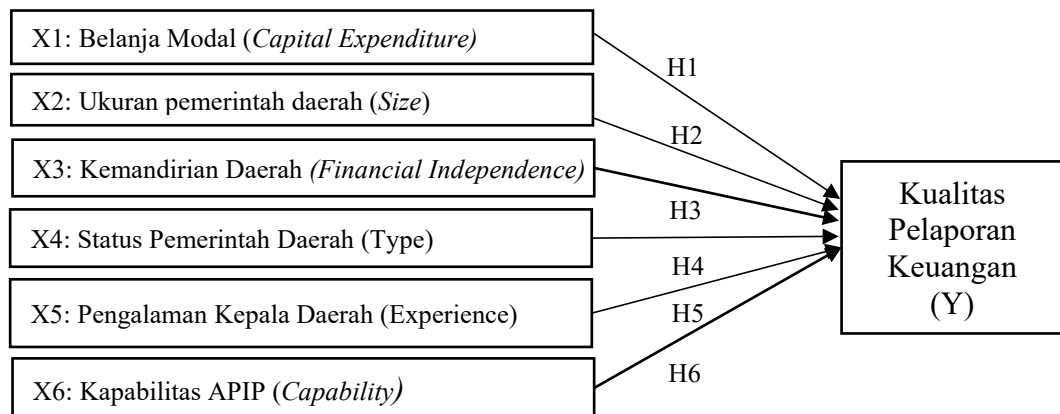
DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of The Quality of Financial Reports. In *International Journal of Professional Business Review* (Vol. 8, Issue 3). AOS-Estrategia and Inovacao. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Aurelia, C., Nurmayanti, P., Afifah, U., & Setiawan, D. (2024). Determinants of Financial Reporting Quality: Evidence from Local Governments in Sumatera Island. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 175–190. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i1.31788>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*. <https://www.bpk.go.id/ihrs/2023/II>.
- BPKP. (2021). *Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021*.

- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Lubis, R. F. (2022). Analisis Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Keuangan Non Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23, 179–198.
- Fajri, N., & Ritonga, I. T. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan. *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 7.
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Rizal Yuniar, M. (2022). Local Governments Financial Reporting Quality In Papua And West Papua: Do Local Government Characteristics Matter? *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 139–147. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol. 4, Issue 2). www.djpk.kemenkeu.go.id,
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Hafsari, P. (2020). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/23660>.
- Karaeng, S., & Oktaviani, A. R. (2023). Pengaruh Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2, 326–338. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jpmi/article/view/4063/2299>
- Kurniati, Sylvia, & Abdullah. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kuntabilitas Pelaporan Keuangan. *GBJ Gendhera Buana Jurnal*, 2, No 1, 15–29.
- Peraturan Kepala BPKP, Pub. L. No. 4, Badan Pengawasan dan Pembangunan RI (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menkumham (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, Pub. L. No. 77, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020> (2020).
- Purnamawati, I. G. A., & Hatane, S. E. (2020). Analysis of Local Government Financial Information Quality Based on Internal and External Factors. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 66. <https://doi.org/10.26740/jaj.v11n2.p66-81>
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2019, September). *Determinants of Financial Reporting Quality in the Public Sector: Evidence from Indonesia*. https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_id=3396365.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

- Taek, G. M. (2019). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Periode Anggaran 2012-2017*. Akuntansi Sektor Publik.
- UU No. 23 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (2014).
- Wurangian, C. H., & Sannie, K. S. (2025). *Tinjauan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 s.d. 2024*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/3360-tinjauan-kemandirian-keuangan-daerah-kabupaten-kepulauan-talaud-tahun-2022-s-d-2024.html>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Model Kerangka Penelitian
Sumber: data diolah (2025)

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + (\beta_1 X_{CAPEX}) + (\beta_2 X_{EXPN}) + (\beta_3 X_{SIZE}) + (\beta_4 X_{FINDEP}) + (\beta_5 X_{STATUS}) + (\beta_6 X_{APIP})$$

Keterangan:

P : probabilitas kejadian,

β_0 : konstanta,

$\beta_{1,2,3,4,5,6}$: koefisien regresi dari variabel independen X

X : nilai dari variabel independen.

Gambar 2. Persamaan Regresi Logistik
Sumber: data diolah (2025)

Tabel 1 Hasil Sampling Data

Kriteria	Jumlah
Jumlah kabupaten di Jawa Tengah	29
Jumlah kota di Jawa Tengah	6

Tahun pengujian (2015-2023)	9
Total data dalam penelitian	315
<i>Outlier</i>	7
Total Sampel	308

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Indikator
1	Kualitas Laporan Keuangan (OPINI)	Kualitas laporan keuangan diproksikan dengan opini LHP BPK	WTP = 1 Non WTP = 0
2	Belanja Modal (CAPEX)	Mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa tergantung pada dana transfer pusat (Amanda et al., 2021)	CAPEX ratio = $\frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}}$
3	Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)	Ukuran pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai cakupan atau skala dari suatu entitas tertentu yang dapat direpresentasikan melalui total aset pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Ukuran Pemerintah = $\ln(\text{Total Asset})$
4	Kemandirian Daerah (FINDEP)	Kemandirian daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Wurangian & Sannie, 2025)	FINDEP = $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
5	Status Pemerintah Daerah (STATUS)	Status pemerintah daerah merujuk pada bentuk administratif daerah otonom yang terdiri kabupaten dan kota (UU No. 23 Tahun 2014)	Kabupaten = 0 Kota = 1
6	Pengalaman Kepala Daerah (EXPN)	Pengalaman kepala daerah didefinisikan sebagai jumlah tahun seorang pemimpin memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Pengalaman kepala daerah diukur menggunakan jumlah tahun masa kepemimpinan
7	Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan kemampuan APIP dalam menghasilkan pengawasan yang berkualitas (Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021)	Level 1= Initial Level 2= Indfrastructure Level 3= Integrated Level 4= Managed Level 5= Optimized

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi
SIZE	315	25.88	31.51	29.01	0.54
FINDEP	315	8.75	51.23	18.34	6.84
CAPEX	315	4.29	44.04	15.89	5.38
EXPN	315	1	10	4.30	2.661

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Model	Statistik Kolinearitas	
	Tolerance	VIF
SIZE	0.859	1.164
CAPEX	0.862	1.160
EXPN	0.968	1.033
STATUS	0.872	1.147
APIP	0.860	1.163

a. Dependent Variable: FINDEP

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5 Hasil Uji Kecocokan Model

Chi-square	df	Sig.
2.918	8	0.939

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 6 Ikhtisar model statistik

-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
79.352 ^a	0.186	0.501

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
SIZE	1.185	0.624	3.601	1	0.058	3.270
FINDEP	-0.047	0.107	0.190	1	0.663	0.954
CAPEX	0.135	0.066	4.181	1	0.041	1.145
EXPN	0.030	0.115	0.069	1	0.792	1.031
STATUS(1)	0.843	1.321	0.407	1	0.523	2.322
APIP	2.995	0.645	21.549	1	0.000	19.988
Constant	-38.744	17.499	4.902	1	0.027	0.000

a. Variable(s) entered on step 1: SIZE, FINDEP, CAPEX, EXPN, STATUS, APIP.

Sumber: Data diolah (2025)